

Pancasilais adalah Syarat Mutlak Bagi Calon Presiden Indonesia

Agung Suyono

Mahasiswa Fisip UT Bidang Studi Sosiologi NIM 012547236

Kata Pengantar

Puji Syukur kami haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang karena Nya sajalah saya masih diberi kesempatan untuk menulis makalah ini dan mempresentasikannya dihadapan Bapak Ibu Saudara Saudari Civitas Akademi Fisip UT yang saya hormati.

Terima kasih yang sebesar besarnya juga saya sampaikan kepada Panitia Seminar Nasional Fisip UT tahun 2013 yang telah memeberikan kesempatan saya menulis abstraksi dan makalah yang akan saya presentasikan berikut ini.

Terima kasih juga saya haturkan kepada semua Tokoh Tokoh Poilitik , Pemerintahan dan Ilmuwan Negeri ini yang telah memberi banyak inspirasi dan memperluas cakrawala pemikiran dan memperdalam wawasan saya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini melalui Buku Buku dan Tulisan Tulisan mereka diberbagai media massa baik media cetak maupun media online.

Dalam keterbatasan saya sebagai seorang pencari Ilmu dan Hikmah yang masih tergolong pemula , walupun usia sudah tidak lagi muda , saya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan baik didalam teknik menuliskan makalah maupun didalam gaya bahasa dan pemilihan data dan informasi yang mendukung makalah ini.

Dengan segala kerendahan hati , semua saran dan masukan serta kritikan yang membangun memang sangat saya harapkan dari semua pendengar, pembaca dan hadirin didalam forum yang sangat terhormat di Seminar Nasional Fisip UT tahun 2013 ini , sehingga dikemudian hari saya akan mempunyai kemampuan akademis dan intelektual yang lebih baik lagi didalam menulis dan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah, khususnya dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ingatlah tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan akademis bukan hanya menjadi pertapa dimenara gading di Kampus Kampus yang hidup hanya untuk Ilmu dan demi Ilmu , tanpa kepedulian social dan keberpihakan kita terhadap rakyat yang mengalami penderitaan akibat dari ketidakadilan dan kesalahan kebijakan Pemerintah. Rakyat harus dicerdaskan dalam bidang politik, supaya mereka tidak terus terjerembab didalam lubang yang menjadi perangkap Politisi jahat berkedok wakil rakyat atau pemimpin umat.

Pendahuluan

Pancasila sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Ideologi , dasar dan landasan berfikir dan cita cita yang harus diperjuangkan dan diwujudkan di Indonesia.

Bahwa Ketuhanan Ynag Maha Esa , Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab , Persatuan Indonesia , Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan adalah sila sila dari Pancasila yang seharusnya diperjuangkan dan diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada dan sebagai apapun kedudukan sosial politik atau ekonominya dimasyarakat.

Bagi kebanyakan masyarakat yang awam terhadap Ideologi maka nama dan kata Pancasila bukanlah sesuatu yang sangat bermakna bagi kehidupannya didunia ini, tetapi tidak demikian halnya bagi para pemuda dalam berbagai organisasinya , dan para pemimpin serta aktivis perjuangan mahasiswa di kampus kampus seluruh perguruan tinggi Indonesia. Mereka sangat sadar betapa penting dan berharganya sebuah Ideologi bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara .

Sementara bagi masyarakat awam yang pragmatis paradigma dan mindsetnya adalah hanya terbatas pada bagaimana caranya memenuhi tuntutan kebutuhan hidup fisik dan material belaka . Bekerja sepenuh jiwa raga demi terwujudnya harapan dan cita cita pribadi pribadi dan kelompok kelompoknya sendiri saja dan hanya untuk kalangan tertentu saja.

Sehingga untuk meraih semua yang diinginkannya tidak ada lagi pedoman dan panduan yang yang menjadi pegangan , kecuali kepuasan lahir dan batin mereka sendiri saja dan keuntungan financial menjadi tujuan utama kesibukannya. Hawa nafsu sudah menjadi Tuhan dan penguasa pikiran dan perbuatan mereka.

Perlu diadakan sebuah penelitian yang seksama tentang berapa persen dari seluruh jumlah penduduk dan Warga Negara Indonesia yang sudah mengetahui , mengerti dan memahami apakah arti Pancasila sebagai Ideologi Negara, sebagai Dasar Negara dan Cita Cita seluruh bangsa Indonesia.

Latar Belakang Masalah

Karena selama ini Pancasila sebagai Dasar Negara, Landasan berfikir dan Bercita cita bagi seluruh warga negara Indonesia , termasuk mereka yang bermaksud untuk menjadi pemimpin atau Kepala Pemerintahan atau Wakil Rakyat baik ditingkat Daerah hingga Pusat , tidak dijadikan panduan atau pedoman. Bahkan oleh Lembaga Pemilihan Umum baik ditingkat KPU Pusat maupun Daerah pemilihan calon wakil rakyat atau Kepala Daerah atau Kepala Negara , tidak menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur atau standard calon wakil rakyat atau Kepala Daerah dan bahkan Kepala Negara maka akibatnya adalah seperti yang terjadi saat ini dimana mana berlangsung Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Padahal KKN adalah musuh utama dimasa sebelum Reformasi 1998 yang lalu. Tetapi alih alih memusnahkan atau meniadakan KKN, setelah masa Reformasi justru semakin marak KKN.

Terjadi Kejahatan dimana mana baik yang dilakukan oleh penjahat kelas teri seperti pencopet, pencuri , perampok , dan penodong atau penjambret hingga penipu, pemerkosa dan pembunuh serta korupsi , dan manipulasi dengan segala jenis dan skalanya.

Pembahasan

Menurut saya semua jenis kejahatan dan kesewenang wengan yang berlangsung dimasyarakat tersebut adalah disebabkan oleh karena tidak difahami dan diterapkan kan Ideologi Pancasila didalam memilih wakil rakyat atau Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan baik ditingkat daerah atau pusat. Termasuk juga didalam kegiatan Pemilihan Calon Presiden yang dilakukan secara demokrasi , langsung , umum , bebas dan rahasia , tetapi karena harus diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tertentu keterwakilan suara rakyat sudah dikooptasi oleh kepentingan Pengurus Partai Politik yang mewadahnya.

Hanya dengan mengandalkan jumlah suara pemilih yang terbanyak maka seseorang yang mengajukan diri menjadi pemimpin atau wakil rakyat akan dapat menduduki jabatan publik di Lembaga Lembaga Pemerintahan baik didaerah atau pusat.

Menurut saya Demokrasi yang semacam itu yang hanya mengandalkan kepada Kuantitas , baik kuantitas pendukung maupun kuantitas dana yang dibelanjakan oleh calon wakil rakyat dan calon Kepala Daerah dan Kepala Negara bukan Demokrasi yang diperjuangkan dan dicita citakan oleh para pendiri Negara dan pemimpin Bangsa di masa lalu.

Bangsa Indonesia bersatu bukan disebabkan oleh karena adanya Pemimpin atau calon pemimpin yang dating dengan Partai yang mengusungnya dengan cara membagi bagikan uang kepada calon pemilihnya atau menyeter sejumlah uang tertentu kepada Pengurus Partainya agar diberikan nomor urut tertinggi didalam pencalonan.

Bangsa Indonesia bersatu karena adanya cita cita bersama yang diperjuangkan bersama dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai cita cita mulia bagi kesejahteraan bangsanya. Cita cita mulia itulah yang menjadi dasar dan alasan , mengapa rakyat akhirnya memilih dan mengangkat seorang pemimpin diantara mereka.

Bangsa Indonesia mempercayai calon pemimpin yang bersungguh sungguh memperjuangkan cita cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 didalam kesehariannya , terbukti dengan tidak memperkaya diri dan keluarganya lebih dahulu sebelum mensejahterakan warga bangsanya secara luas.

Secara sederhana cita cita kemedekaan yang diperjuangkan secara diplomatis di meja meja perundingan dengan Pemerintah kolonialis dan dimedan pertempuran bersenjata oleh para pejuang kemerdekaan saya sebut sebagai Ideologi. Ideologi itulah yang menggerakkan , yang memotivasi , yang mendorong para calon pemimpin bangsa Indonesia dulu dan mendorong partisipasi dan dukungan seluruh rakyat .

Tidak ada rakyat yang mendukung atau memilih seorang calon pemimpin karena dibayar atau diberikan uang , belum ada “Money Politic” yang diberlakukan oleh para calon pemimpin bangsa Indonesia. Karena memang pada waktu dulu baik calon pemimpin dan rakyat Indonesia masih dalam keadaan susah ekonominya.

Sebagai akibat dari dikuasanya seluruh sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan pada jaman colonial oleh pemerintah dan bangsa asing , maka tentu saja perjuangan politik bangsa Indonesia pada waktu itu adalah perjuangan merebut kekuasaan atas sumber sumber daya yang dijajah tersebut.

Setiap gerakan politik yang dilakukan oleh calon pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu akan berakhir jika Pemerintah colonial menangkap dan mengasingkan mereka , tetapi semangat dan gelora dihati seluruh rakyat tidak pernah berakhir untuk terus memperjuangkan hak hidupnya di dalam kemerdekaan.

Tanpa dibayar sesen rupiahpun dimana mana seluruh rakyat akan berhimpun dan bersatu padu menetapkan dan memantapkan pilihannya kepada para calon pemimpin yang mereka nilai memiliki integritas pribadi yang kuat , dapat dipercaya kata kata dan perbuatannya. Tidak berbeda antara apa yang mereka nyatakan dengan praktek nyata kehidupan mereka sehari harinya.

Didalam Sistem Politik Kepartaian yang seperti sekarang ini , menurut saya rakyat kembali mengalami masa penjajahan , jika dahulu dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan Dagang asing yang disebut VOC, maka bentuk penjajah baru sekarang adalah Partai Partai Politik.

Demokrasi yang pada awalnya berarti kekuasaan ditangan rakyat , tetapi ketika Partai Politik sudah mengklaim hak politik rakyat , maka Demokrasi sudah berubah menjadi Oligarki. Dan bahkan jiwa Demokrasi yang bersifat langsung , umum , bebas dan rahasia sudah tidak lagi menjadi pedoman kehidupan berpolitik bangsa Indonesia. Karena Partai Politik telah mengkebiri hak politik rakyat , sehingga rakyat tidak bisa langsung memilih calon wakil atau pemimpinnya tanpa melalui sebuah Partai Politik.

Ibarat sebuah peta maka wilayah politik telah dibagi bagi menjadi milik Partai Partai Politik. Kedaulatan rakyat telah dimarginalisasi dan diminimalisir menjadi Kedaulatan Partai Politik.

Partai Politik adalah Penguasa tertinggi atas keputusan politik rakyat , hanya melalui Rapat Pengurus Partai calon calon wakil rakyat tertentu saja yang bisa dicatat dan didaftarkan sebagai calon anggota DPR atau DPRD. Birokrasi dan Organisasi Partai Politik begitu agresif dan intimidatif mempengaruhi partisipasi rakyat , tanpa memberikan kesempatan dan peluang kepada rakyat untuk berfikir dan menentukan pilihannya sendiri.

Dalam Demokrasi “ Wani Piro “ seperti sekarang ini hanya calon calon wakil rakyat yang mempunyai cukup dana saja yang bisa diterima oleh Partai Politik untuk bisa dicantumkan namanya didalam Lembaga KPU Pusat atau Daerah untuk menjadi anggota DPR atau DPRD.

Demokrasi Liberal sudah menjadi budaya dimana kebebasan menjadi wakil rakyat atau calon pemimpin Lembaga Lembaga Negara sangat tergantung kepada “TKP” , “T” untuk Transfer uang kepada Pengurus Partai, “K” untuk Koneksi dengan Pengurus Partai Politik dan” P” untuk Popularitas. Sehingga siapa yang mempunyai cukup dana untuk di Transfer kepada Pengurus Partai , siapa saja yang mempunyai Koneksi dengan Pengurus Partai dan siapa saja yang Populer dimasyarakat akan mendapatkan kesempatan dan peluang yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai TKP didalam sistem politik kini.

Bagi calon wakil rakyat atau calon Kepala Daerah dan Negara yang solusi masalahnya cukup diatasi dengan “ TKP ‘ dan “Wani Piro” tersebut , maka Kualitas Pribadi , Integritas Akhlak atau Moral dan Kesetiaan serta komitmen terhadap Ideologi Negara yaitu Pancasila bukan masalah bagi mereka. Bahkan bagi mereka Pancasila pun sudah tidak dianggap Ideologi lagi , paling tidak Pancasila telah diabaikan atau tidak diacuhkan lagi keberadaannya.

Didalam sistim Politik Transaksional , maka Politik dan Jabatan Publik sudah menjadi komoditas dan Jasa yang diperdagangkan dan diperjual belikan. Partai Politik menyediakan Jasa berupa Wahana Politik bagi para petualang dan pecurang bangsa dengan mengatas namakan “kepentingan rakyat” memperjuangkan nasib pribadi , keluarga dan partainya.

Sebagai imbalannya maka para pecundang dan pecurang Ideologis itu akan membayar sejumlah uang kepada Partai Politik yang telah memfasilitasi atau memudahkannya meraih jabatan public. Dan cara pembayarannya pun telah diatur, mau yang Cash in Advance , Uang kontan dimuka, sebelum seseorang dicantumkan namanya sebagai Calon Wakil Rakyat atau calon Kepala Daerah dan Negara maupun dengan cara Instalment atau mencicil atau mengangsur , yaitu dengan cara jika telah terpilih sebagai wakil rakyat baru akan memberikan sekian persen dari Gaji atau Incomenya dari Lembaga Negara yang membayar Gajinya, disisihkan untuk Kas Uang Operasional Partai. Atau yang lebih parah lagi jika sudah terpilih menjadi Kepala Daerah atau Kepala Negara akan memberikan imbalan berupa Proyek Proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD.

Dari beberapa kasus bahkan kita bisa mencatat ternyata para Anggota DPR atau DPRD pun bisa bekerja sama dengan Pengusaha atau yang menjadi Donatur semasa kampanyenya dulu , dalam bentuk mengatur Proyek dan Anggaran Belanjanya sebelum Proyek dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah itu dibahas. Jika didalam hubungan Industri kita mengenal istilah Tripartit yaitu Hubungan antara Pengusaha , Buruh dan Pemerintah maka didalam hubungan Sistim Politik Transaksional inipun kita mnegenal istilah “Trias Corruptica”, yaitu sebuah Konspirasi jahat antara Legisla”thieves”, Execu”thieves” dan Yudica”thieves” yang semuanya adalah maling uang Negara atau Uang Rakyat.

Semua oknum yang terlibat didalam praktek perampokan uang Negara yang sebenarnya adalah juga uang rakyat, yang dibayar melalui berbagai pajak, mereka itu saling bekerjasama , saling berkolaborasi dan saling melindungi , bahkan saling mendukung satu kepada yang lainnya sehingga Pemerintah yang pada awalnya didirikan untuk mensejahterakan seluruh rakyat telah berubah fungsinya hanya “ untuk mensejahterakan Golongan Sendiri yaitu Keluarga dan Partainya saja.

Seorang Kepala Negara dengan tega hati dan kepala dingin menyatakan bahwa” Masalah Korupsi adalah masalah Hukum , saya tidak akan mengintervensi masalah Hukum , karena ada Lembaga dan Pejabat Publik yang berwenang menangani masalah tersebut , yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK “. Tetapi bagaimana halnya jika Lembaga Penegak Hukum dan Pejabatnya juga terlibat dalam “ Mafia Anggaran “ ? Masih adakah Lembaga dan Penegak Hukum yang akan mengadili dan mengeksekusi hukuman terhadap para pelanggar hukum tersebut yang masih bisa dipercaya oleh rakyat ?

Sementara sebagian besar rakyat masih hidup dibawah standar kelayakan , sebagian kecil Pejabat Pemerintah dan Pengusaha Hitam secara “berdarah dingin” membiarkan para buruh didalam negeri dan TKI atau TKW diluar negeri berjuang menyabung nyawa hanya untuk memperoleh kehidupan yang layak. Tuntutan buruh atas Upah Minimum Provinsi yang memenuhi syarat dan standar Hidup Layak mengalami hambatan dan halangan yang luar biasa dari pihak Pengusaha atau Pemerintah yang Anti Pancasila.

Dengan alasan demi menyelamatkan investasi , maka hak hak rakyat yang menjadi buruh beserta seluruh keluarganya untuk hidup layak , dikorbankan Kenapa jika PNS boleh mendapatkan Gaji Minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak ditanggung oleh Negara ? sedangkan Karyawan Perusahaan Swasta yang juga menjadi WNI yang seharusnya hak haknya juga dijamin oleh Pemerintah , tidak dilaksanakan ? Apakah karena para pejabat Negara sekelas Menteri , Anggota DPR dan DPRD atau Pejabat Tinggi Negara lainnya yang telah memperoleh pendapatan Puluhan bahkan ratusan juta dan miliaran rupiah setiap bulannya merasakan kesulitan hidup dan penderitaan sebagian besar rakyatnya ?

Jelas bahwa Pemerintah telah bertindak diskriminatif dalam hal ini , kebijakannya tidak menguntungkan dan apalagi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa perusahaan asing seperti Freeport di Papua diizinkan untuk mengeksploitasi hasil bumi dan kekayaan Indonesia di bumi Irian dengan hanya mendapatkan imbalan royalti sebesar satu persen , sementara sebagian besar rakyat Papua dibiarkan sengsara, bahkan uang yang mereka punyai hanya cukup untuk membeli koteka. Pemerintah dan Pejabat Lembaga Negara bermoral macam apa yang dengan sangat tega hati dan rasional serta sistimatis membiarkan sebagian besar rakyat nya hidup menderita dalam kemiskinan , sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dieksploitasi habis habisan oleh Perusahaan asing.

Kisah Freeport hanyalah satu kasus dari sekian banyak contoh ketidak berpihakan Pemerintah dan tentu saja Kepala Negara terhadap seluruh tanah air dan rakyat Indonesia .Lalu pertanyaannya adalah apakah kita masih mau dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang seperti ini lagi ? Yang tidak mempunyai mempunyai cita cita dan motivasi kuat untuk membela dan melindungi kepentingan seluruh rakyatnya ? Jelas menurut saya Kepala Negara seperti ini adalah penghianat bangsa dan penghianat Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Masihkah ditahun 2014 yang akan datang kita akan memilih calon Presiden yang “ anti Pancasila “? Yang hanya menyebut Pancasila didalam Pidato Pidato Kenegaraannya , tanpa pernah bersungguh sungguh mewujudkannya dalam praktek kehidupan nyata sehari hari ?

Masihkah kita mau percaya kepada calon calon Presiden yang mengumpulkan harta dan kekayaan dari berbagai sumber dengan segala cara dan kemudian berjanji akan memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat hanya didalam media media massa yang dimilikinya dan atau dibayarnya ? Masihkan kita mau percaya dengan calon calon Presiden Indonesia yang didalam kesehariannya hanya sibuk mengumpulkan harta dan pengaruh melalui Partai Partai Politik yang didirikan dan dipeliharanya , dengan kata kata dan kalimat kalimat manis yang memikat , dengan redaksional oratoris yang puitis tetapi padahal sebenarnya adalah sebuah siasat tipu muslihat bagi seluruh rakyat , ketika dia sudah berkuasa nantinya berbeda yang akan dilakukannya.

Masihkah kita mau menderita lima tahun kedepan karena salah memilih Presiden yang dibungkus dan dikemas dengan rapih oleh Perusahaan Perusahaan Public Relations yang menjadi Biro Biro Iklan Penjahat berkedok Malaikat ? Jika kita masih mau dipimpin oleh Calon Calon Presiden seperti itu sungguh benar benar bodohnya kita , seperti keledai keledai yang mau masuk kelubang perangkap yang sama berulang kali sambil tetap tersenyum dan merasa senang walaupun sedang ditipu.

Jika jawaban kita semua adalah tidak mau lagi tertipu dan dibohongi oleh jargon jargon politik kosong melompong yang diusung oleh Partai Partai Politik beserta Kroni Kroni Pendukungnya marilah kita semua besatu padu dengan mengatakan “ Tidak “. Katakan Tidak kepada calon calon Presiden Indonesia yang tidak menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila, katakan “ Tidak “ kepada kampanye kampanye calon calon Presiden yang hanya hanya menjual angan angan dan janji janji surga. Katakan “Tidak” kepada penggiringan “Opini Publik “ yang mencitrakan kebaikan dan kemuliaan seorang calon Presiden yang dalam kenyataannya tidak lain hanyalah musang atau bahkan Srigala berbulu Domba.

Lalu seperti apakah calon Presiden yang akan kita pilih nantinya ? Apakah yang hanya sesuai dengan Kriteria KPU , yaitu Calon Presiden yang disuung oleh Partai yang mencapai ambang batas atau Parliamentary Threshold , yaitu Partai Partai yang berhasil meraih sekian persen suara dan kursi wakil rakyat di DPR dalam Pemilu dibulan April ditahun 2014 yang akan datang ? Padahal kita semua tahu bahwa para calon calon anggota DPR atau DPRD tersebut sebagian besar melakukan Politik Tarnsaksional atau melakukan Money Politic atau Korupsi Uang dari APBN atau APBD di Lembaga Negara atau pemerintahan sebelumnya atau di Perusahaan Swasta yang dimilikinya yang berKKN dalam Proyek Proyek Pemerintah .

Sehingga dengan mengakumulasi Modal Dana yang dikumpulkan dari praktek Korupsi di Lembaga Pemerintah atau kerja sama dengan Perusahaan Swasta tersebut , dana tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk membiayainya berkampanye untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Kepala Daerah . Seluruh rakyat harus dibangunkan , disadarkan dan diingatkan jangan lagi hanya dengan uang sekali Rp 50.000,- yang didapatkan dari Tim Sukses didalam masa masa kampanye seorang Calon Kepala Negara atau Kepala Daerah dan Wakil Rakyat harus menderita lima tahun kedepan dan hanya menikmati Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah tanpa merasakan manfaatnya secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan.

Jika kita hanya mengandalkan criteria atau tolok ukur KPU bahwa yang berhak mengajukan calon Presiden adalah Partai Politik yang memperoleh suara dan kursi mayoritas di DPR hasil pemilu Parlemen di tahun 2014 , yang sesungguhnya hanyalah Demokrasi Kuantitas, maka Kriteria dan Tolok Ukur yang sesungguhnya yaitu Ideologi Pancasila akan kita abaikan dan lupakan.

Kita harus mendidik dan melatih rakyat untuk berfikir kritis bahwa Calon Presiden Indonesia mutlak yang berjiwa dan berkelakuan Pancasila dalam kesehariannya. Tidak mungkin seorang Pengusaha yang Kapitalistik yang mengutamakan akumulasi modal dalam usahanya dan meningkatkan jumlah kekayaan Perusahaan pribadinya dapat dipercaya untuk mensejahterakan seluruh bangsa. Omong Kosong dan Bohong belaka jika mantan Pejabat di masa Pemerintahan yang lalu yang telah secara sengaja memperkaya diri sehingga memiliki asset property dan financial dimana mana dapat dipercaya akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia , mustahil mereka akan membela perjuangan para buruh didalam negeri dan TKI atau TKW diluar negeri, mustahil mereka dapat dipercaya akan mewujudkan kesejahteraan para nelayan tradisional dipantai pantai Indonesia yang hanya mengandalkan jukung jukung dan perahu perahu layar pencari ikan yang dikalahkan oleh Trawl Trawl besar milik Perusahaan Perikanan atau nelayan asing yang memasuki perairan laut Indonesia.

Mustahil dapat dipercaya para pemimpin pemimpin berkedok agama , mengatas namakan Allah dan Nabi Muhammad atau Nama Tuhan dan Kitab Kitab SuciNya yang lain tetapi kesibukannya

sehari hari hanya memperkaya diri dan keluarga serta kelompoknya dengan dalih mengamalkan ajaran agamanya . Bukan maksud saya mendeskreditkan para ulama , pendeta atau pimpinan rohani lainnya yang masih murni didalam pengabdianya kepada Tuhan dan umatnya. Tetapi memang fenomena seperti itu ada di Negara kita, jika tidak , bagaimana mungkin ada Dana Abadi Umat di Kementrian Agama sebesar 60 Triliun Rupiah yang mungkin didepositokan di Lembaga Keuangan tertentu sementara banyak Umat Islam atau Rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mayoritas juga kemiskinannya , mereka dapat kita temui banyak berada dikawasan kumuh diseluruh kota dan daerah diseluruh Indonesia.

Kesimpulan

Ideologi Pancasila memang masih ada didalam Buku Buku Pelajaran Sekolah dan Kuliah Kuliah Mahasiswa di Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia , di Upacara Upacara Bendera di Halaman halaman Sekolah, Halaman halaman Istana dan Kepala Kepala Pemerintah Daerah , dihari peringatan Kemerdekaan 17 Agustus , tetapi didalam praktek kesehariannya kita mengamalkan atau mendukung dan membiarkan Sistim Ekonomi Liberal dan Sistim Politik Demokrasi Transaksional berlangsung dan Budaya Import kita puja puji dan banggakan. Hutan Hutan terus digunduli, Illegal Logging dengan dukungan Aparat Yang berkuasa terus berjalan dengan Damai Itu Indah , Selalu Mengayomi dan Selalu Melindungi begitu katanya . Pertambangan Yang mengakibatkan Dampak Lingkungan buruk dan tidak meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat terus berlanjut , sementara para Kepala Daerah dan Pejabat pejabat terkait menerima manfaat darinya, tidak demikian halnya dengan nasib rakyat yang tetap melarat menjadi buruh buruh tambang dengan perlindungan kesehatan dan pendapatan yang minimalis dan terus menjalani kehidupan yang miris hamper sekarat.

Ketuhanan Yang Maha Esa telah lama beralih maknanya menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab telah lama bergeser menjadi Kemanusiaan Yang Mana Adil dan Biadab dimana semua menghalalkan cara, Persatuan Indonesia telah terancam oleh Persatuan Koruptor Indonesia (PKI), Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan telah berlai menjadi Kerakyatan hanya Pencitraan yang ditampilkan oleh Pejabat atau Calon Pejabat Yang bermusyawarah untuk mengelabui rakyat dalam bidang keuangan dan kekuasaan, akhirnya Keadilan Sosial hanya menjadi Utopia dan Mimpi rakyat disiang bolong.

Mengakhiri Presentasi Makalah saya ini saya hanya ingin menghimbau kepada seluruh civitas akademika Fisip UT dan hadirin pada umumnya marilah kita sebar luaskan kesadaran dan pemahaman betapa pentingnya sebuah Ideologi bagi sebuah bangsa dan Negara . Jika Pancasila sudah tidak dianggap lagi dan diabaikan oleh sebagian besar Warga Negara Indonesia, maka sesungguhnya sebagai sebuah bangsa atau Negara Indonesia kita hanya tinggal namanya saja. Innalillahi Wainnailaihi rojiun Indonesia telah berpulang kerahamtullah , yang ada tinggal jasadnya saja yang seperti bangkai atau mayat hidup, karena jiwanya atau ruhnya yaitu Pancasila telah lama dilupakan dan dikuburkan bersama sama para Koruptor dan Manipulator berbaju Pemerintah dan Pengusaha yang secara berdarah dingin dan kepala dingin membunuh rakyat secara perlahan lahan sambil senyum senyum diruangan sejuk kantor dan villa villa atau apartemen apartemen mewahnya atau sambil mengendarai mobil mobil mewahnya dikawal sepasukan bersenjata , seraya berkata : “ Pancasila ? Emang Gue Pikirin . Merdeka

Daftar Pustaka

1. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi
Kabul Budiyo, Dr .H. M.Si
2. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila
Sunaryo Wreksosuhardjo Prof.Drs
3. Konsistensi Nilai Nilai Pancasila Dalam UUD 45 dan Implementasinya
Kumpulan Makalah Kongres Pancasila – Pusat Studi Pancasila UGM
4. Pancasila Dasar Negara – Kursus Presiden Sukarno tentang Pancasila
5. Kumpulan Pidato Bung Karno – dari berbagai sumber
6. Media TV , Radio dan Koran
7. Youtube : Pidato Pidato Bung Karno (Arsip Nasional)
 - http://www.youtube.com/watch?v=Apb_Rk-04gw&list=PLCEAD6A9D9164D1C0
 - <http://www.youtube.com/watch?v=yngjxqA7460&list=PLCEAD6A9D9164D1C0>
 - http://www.youtube.com/watch?v=1QjFs_Df99Q